

TINGKAT KESIAPAN SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SD NEGERI 1 TRIRENGGO

THE SCHOOL READINESS TO IMPLEMENT EDUCATION CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS

Oleh: Fahad Nisa Utami, PSD/PGSD
fahadphaa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan sekolah dalam implementasi pendidikan anak berkebutuhan khusus di kelas IV B SD Negeri 1 Trenggong yang meliputi: kurikulum, tenaga pendidik, sarana-prasarana, dan lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru kelas dan siswa kelas IV B. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi metode dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek kurikulum, belum semua proses pengembangan PPI diikuti; tim pengembang PPI dan pengembangan PPI belum dilakukan; modifikasi kurikulum dan inti materi, pengaturan pemberian layanan, perencanaan waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi sudah dilakukan meskipun belum sempurna, namun sekolah sudah memiliki format PPI. Pada aspek tenaga pendidik, baru dua kompetensi teknis dan baru satu kompetensi kolaboratif yang dapat dilakukan guru. Pada aspek sarana dan prasarana, belum sesuai dengan standar, namun sudah dapat menunjang kebutuhan ABK; sekolah juga telah melakukan pengelolaan sarana dan prasarana khusus. Pada aspek lingkungan masyarakat, semua indikator telah dilaksanakan.

Kata kunci: *tingkat kesiapan sekolah, pendidikan inklusi, ABK*

Abstract

This research aimed to know the determine level of school readiness to implement education children with special needs in class IV B SD Negeri 1 Trenggong, include: curriculum, teacher, infrastructure, and environment. This study was a qualitative descriptive research. The subject were headmaster, teacher and students in IV B. The data were collected by observation, interview and documentation. Data were analyzed by data reduction, data display, and conclusion. The data validation used technique and source triangulation. The results show that on curriculum aspects, not all the development of PPI process are followed; PPI developers team and PPI development has not been done; curriculum modification and materials, service delivery setting, time planning of implementation and evaluation criteria has been done although not yet perfect; but the school already has the PPI format. In the teaching staff aspect, only two technical competences that and only one collaborative competence which the teacher do. The infrastructures aspect is unstandard, but has been able to support the ABK needs; the school is also made a management of special infrastructure. In the environmental of society aspect, all the indicators have been implemented.

Keywords: the school readiness, inclusive education, children with special needs

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu hak dasar yang dapat diperoleh oleh seluruh warga negara. Hal ini tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab IV pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang

sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Berdasarkan undang-undang tersebut, tak terkecuali warga negara yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, sosial, maupun intelektual pun juga berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama. Dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan Inklusif, juga telah menjelaskan

pendidikan inklusi sebagai suatu sistem yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus (ABK) mendapatkan layanan dalam sekolah terdekat dengan lingkungan tempat tinggalnya

Dalam Jambore Nasional Anak Berkebutuhan Khusus Jenjang Pendidikan Dasar tahun 2013, Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Hamid Muhammad menjelaskan bahwa saat ini terdapat 330.000 anak berkebutuhan khusus tingkat pendidikan dasar. Namun dari jumlah itu yang mengenyam pendidikan sebanyak 116.000 anak. "Jadi masih ada 65% anak berkebutuhan khusus yang belum terlayani pendidikan. Untuk menyukseskan wajib belajar sembilan tahun, pemerintah akan menyiapkan layanan pendidikan melalui SLB dan sekolah inklusif. Akan tetapi, masih ada 100 lebih Kabupaten yang belum mempunyai SLB, sehingga ini memberikan kesempatan kepada sekolah reguler mau menjadi sekolah inklusif. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk sekolah inklusif menyediakan pendidikan yang lebih layak untuk anak berkebutuhan khusus tanpa harus mengenyam pendidikan di SLB. (PKLK, 2013)

Sebagai pembaharuan pendidikan, pendidikan inklusif lahir karena banyaknya anak berkebutuhan khusus yang semakin bertambah dan akses pendidikannya terbatas, karena lokasi SLB pada umumnya berada di Ibu Kota Kabupaten. Padahal anak-anak berkebutuhan khusus tersebar tidak hanya di Ibu Kota Kabupaten tetapi hampir di seluruh daerah (kecamatan/desa). Akibatnya, sebagian anak berkebutuhan khusus, karena faktor ekonomi terpaksa tidak disekolahkan oleh orang tuanya

karena lokasi SLB jauh dari rumah, sedangkan SD terdekat tidak bisa menerima karena merasa tidak mampu melayaninya. Sebagian yang lain, mungkin selama ini dapat diterima di SD terdekat, namun karena ketiadaan pelayanan khusus bagi mereka, akibatnya mereka kurang dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki secara optimal (Direktorat PLB, 2007: i).

Adanya model pendidikan inklusi merupakan suatu wadah untuk mencapai ketuntasan wajib belajar sembilan tahun. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih saja banyak fakta yang menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi tersebut. Seperti yang telah dimuat dalam Harian Jogja (10/4/2015), Kabupaten Bantul sampai saat ini sama sekali belum memiliki tenaga pendidik untuk sekolah inklusi. Kepala Dinas Pendidikan Dasar (Disdikdas) Bantul, Totok Sudarto mengatakan, bahwa selama ini masih mendapat pinjaman tenaga pendidik dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY. Padahal Bantul membutuhkan 33 tenaga pendidik untuk sekolah inklusi.

Dari data dinas pendidikan sekolah dasar Kabupaten Bantul, penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus tingkat sekolah dasar telah diselenggarakan oleh 58 sekolah dasar, dan kurang lebih terdapat 741 anak berkebutuhan khusus. Salah satu sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi di Kabupaten Bantul adalah SD Negeri 1 Tirenggo, yang merupakan sekolah *re-grouping* dari SD Klembon dan SD Tanubayan. Sebelumnya, SD Tanubayan sudah menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi (SPPI). Setelah, *regrouping*, ABK yang

dulu bersekolah di SD Tanubayan pun juga ikut berpindah ke SD 1 Trirenggo. Akan tetapi hal ini mengakibatkan banyak wali murid dari siswa yang menjadi enggan untuk menyekolahkan anak mereka bersama ABK yang ada, hingga banyak orang tua yang memindahkan anak mereka dari SD tersebut. Pada tahun pelajaran 2015/2016 ini, terdapat kurang lebih 40 siswa ABK, tapi baru 26 siswa yang mendapatkan *assesment* langsung dari PLB UNY.

SD 1 Trirenggo, saat ini memiliki 1 Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang diperbantukan dari dinas, akan tetapi GPK tersebut hanya akan berada di sekolah tersebut selama 2 hari setiap minggunya. Hal ini mengakibatkan kurangnya bimbingan yang seharusnya diberikan kepada ABK. Terlebih lagi untuk siswa di kelas IV B. Di kelas tersebut terdapat beberapa anak yang mengalami kelainan dan membutuhkan perhatian khusus, diantaranya adalah anak yang mengalami tuna daksa, anak autis dan juga anak hiperaktif. Selain hal tersebut, saat ini sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran terutama untuk ABK juga belum maksimal, karena masih disamakan dengan sarana-prasarana untuk siswa normal dalam pembelajaran yang berlangsung. Saat proses pembelajaran berlangsung, guru kelas pun masih menggunakan kurikulum terpadu, sehingga kebutuhan ABK yang ada kurang terwadahi secara maksimal.

Dijelaskan pada pasal 5 Kepmendiknas No. 70 Tahun 2009 yakni penerimaan peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah. Sehingga, dengan

terpilihnya suatu sekolah sebagai sekolah penyelenggara layanan inklusi, sekolah tersebut seharusnya telah memiliki kesiapan sesuai SPN (Standar Nasional Pendidikan).

Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005, manajemen dan kesiapan penyelenggaraan pendidikan suatu sekolah akan efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah, kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa, kemampuan dan tanggung jawab tenaga kependidikan yang handal, sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, dana yang cukup untuk menggaji staf sesuai dengan fungsinya, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Apabila salah satu hal di atas tidak sesuai dengan yang diharapkan dan/atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka tingkat kesiapan penyelenggaraan pendidikan menjadi kurang optimal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 22 April – 22 Mei 2016. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Trirenggo Bantul Yogyakarta.

Subjek dan Obyek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru kelas IV B, dan siswa kelas IV B. Obyek dalam penelitian ini yaitu tingkat kesiapan sekolah dalam implementasi pendidikan anak berkebutuhan khusus.

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar observasi dan pedoman wawancara.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan dengan melakukan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Kesiapan Aspek Kurikulum.

a. Mengikuti Proses Pengembangan PPI

Sebelum PPI dibuat, sekolah terlebih dahulu harus mengikuti proses pengembangan PPI. Direktorat PLB (2007:20) mengemukakan bahwa proses pengembangan PPI meliputi tahap penjaringan dan identifikasi, rujukan, pertemuan tim rujukan, asesmen, dan pertemuan tim asesmen. Dengan adanya tahap penjaringan dan identifikasi, rujukan, pertemuan tim rujukan, asesmen, dan pertemuan tim asesmen, sekolah dapat mengetahui kebutuhan khusus yang dimiliki anak sehingga dapat menembangkan PPI sesuai dengan kebutuhan siswa.

Di SD N 1 Trirenggo tahap penjaringan dan identifikasi dilakukan saat anak mendaftar di sekolah. Pihak

sekolah akan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak orang tua siswa terkait kekhasan yang dimiliki anaknya, atau dapat juga dengan cara membawa anak tersebut ke sekolah.

Setelah siswa teridentifikasi, siswa akan dirujuk pada tim asesmen. Pada tahap asesmen, sekolah bekerjasama dengan PLB UNY, namun tidak menutup kemungkinan untuk orang tua yang akan melakukan asesmen mandiri.

b. Membentuk Tim Pengembang PPI

Langkah awal dalam penyusunan program pembelajaran individual adalah membentuk suatu tim yang disebut dengan tim PPI. Mulyono Abdurrahman (2003: 57) mengungkapkan bahwa tim pengembang PPI yang ideal adalah dari orang-orang yang bekerja dengan anak dan memiliki informasi yang dapat disumbangkan untuk menyusun rancangan pendidikan yang komperhensif bagi anak. Secara umum orang-orang tersebut mencakup guru khusus, guru reguler, kepala sekolah, orang tua, *diagnostician*, dan spesialis lain (konselor dan *speech therapist*), serta kalau mungkin juga anak yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian, SD N 1 Trirenggo belum membentuk tim pengembang PPI. Hal ini disebabkan karena PPI juga sedang dalam proses perencanaan. Beberapa waktu sebelumnya sudah ada perumusan PPI yang dilakukan oleh GPK, namun mulai

bulan Januari tahun 2016, GPK yang merupakan bantuan dari pemerintah provinsi tersebut ditarik kembali oleh untuk dilakukannya rotasi, maka PPI tersebut kembali batal untuk dirumuskan.

c. Melaksanakan Pengembangan PPI

Misbach (2012:46) mengungkapkan Program Individual merupakan program pengajaran dimana siswa dapat mengerjakan dengan tepat tugas-tugas dengan tepat waktu yang cukup dan kondisi yang termotivasi. Selain memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat belajar sesuai kebutuhan, kemampuan, kecepatan, dan caranya sendiri, serta agar siswa dapat belajar secara optimal dan bisa mencapai tingkat penguasaan bahan pelajaran yang dipelajarinya. Dengan kata lain, dengan adanya PPI dapat memudahkan siswa untuk mencapai target belajar yang dapat dipelajarinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Di SD N 1 Tirirenggo secara umum pengembangan PPI untuk tiap siswa belum dibuat. Selain dikarenakan kekosongan posisi GPK yang ada, kepala sekolah juga belum mewajibkan semua guru untuk membuat PPI, akan tetapi, terdapat juga guru yang telah membuat PPI untuk siswanya.

d. Melakukan Modifikasi Kurikulum dan Isi Materi

Dalam Buku 3 DPLB, (2004:32-33) dijelaskan bagi peserta didik yang

memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan relatif normal materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat tetap dipertahankan, atau tingkat kesulitannya diturunkan sedikit sedangkan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan di bawah normal (peserta didik lamban belajar atau tunagrahita) materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat dikurangi atau diturunkan tingkat kesulitannya seperlunya, atau bahkan dihilangkan bagian tertentu.

Sesuai hasil penelitian yang dilakukan, SD N 1 Tirirenggo menggunakan model pengembangan kurikulum duplikasi (Merubah atau disesuaikan) dan juga omisi (menghilangkan). Kepala sekolah menyatakan bahwa tidak semua ABK memerlukan adanya modifikasi kurikulum ataupun materi isi. Apabila anak dirasa masih bisa mengikuti kurikulum reguler, maka anak akan tetap diikutkan pada kurikulum tersebut. Misal saja untuk anak tuna rungu ringan. Modifikasi yang dilakukan hanya dalam hal tertentu saja, selama IQnya masih menjangkau, maka akan diikutkan kurikulum reguler. Namun, misal saja anak tuna grahita, karena rata-rata penangkapan materi tidak bisa seperti anak reguler maka akan diberikan modifikasi. Modifikasi tersebut berupa pengurangan beban belajar. Saat diberikan tugas, anak ABK akan

mendapatkan setengah dari tugas yang diberikan pada anak reguler.

e. Mengatur Pemberian Layanan

Ina Rosilawati (2013: 16) menyatakan bahwa agar ABK tidak terabaikan dalam pendidikan inklusi, maka perlu dilakukan manajemen layanan khusus. Hal ini dikarenakan siswa di sekolah inklusif terdiri atas anak-anak normal dan anak-anak berkebutuhan khusus. Pemberian layanan dapat mencakup manajemen kesiswaan, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pendanaan dan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian, pemberian layanan khusus di SD N 1 Trirenggo diberikan satu minggu sebanyak 2 kali, yaitu tiap hari Senin dan hari Jumat. Hari Senin dikhususkan untuk ABK secara klasikal, dan hari Jumat untuk siswa *slow learner* yang masih kesulitan dalam hal calistung (baca tulis hitung). Namun karena kosongnya posisi GPK, saat ini, pemberian layanan yang untuk ABK dilakukan oleh guru kelas masing-masing. Layanan masih terbatas pada proses pembelajaran secara umum, misal saja pendampingan belajar dan juga penjelasan berulang pada ABK yang belum memahami materi.

f. Merencanakan Waktu Pelaksanaan dan Kriteria Evaluasi

Buku 2, Direktorat PLB (2007:10) menjelaskan bahwa komponen waktu

pelaksanaan dan kriteria evaluasi berisi rencana tanggal dimulainya kegiatan untuk setiap tujuan khusus, jangka waktu kegiatan dan tanggal evaluasi, untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan, selain itu juga adanya deskripsi metode dan kriteria evaluasi yang akan digunakan. Dengan adanya penjelasan tersebut, dapat menjadi acuan target guru dalam waktu pemberian materi (tujuan khusus) yang akan digunakan, serta waktu pelaksanaannya.

Mulyono (2003: 59) juga menambahkan, dengan adanya kriteria evaluasi dapat menjadi patokan pengukuran derajat pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran khusus yang telah diselesaikan.

Berdasarkan hasil penelitian, waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi untuk ABK belum dibuat secara terpisah dengan anak reguler, karena waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi nantinya menjadi bagian dari PPI. Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, Kepala Sekolah menyatakan bahwa untuk ABK di SD N 1 Trirenggo belum memiliki PPI untuk tiap anak. Untuk ABK yang ada saat ini masih mengikuti waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi sama seperti anak reguler, meskipun pada kenyataan pelaksanaannya tidak akan bisa untuk disamakan. Kriteria evaluasi untuk ABK biasanya hanya akan separuh dari anak reguler. Sehingga secara administratif,

waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi masih disamakan dengan anak reguler. Namun untuk pelaksanaannya ABK memiliki kriteria evaluasi tersendiri.

g. Memiliki model atau format PPI

Mulyono (2003: 56) menyatakan dengan adanya format PPI, diharapkan guru akan terdorong untuk melakukan asesmen tentang karakteristik belajar tiap ABK dan melakukan usaha-usaha untuk mempertemukan dengan kebutuhan individu mereka. Dengan kata lain, dengan adanya contoh dalam pembuatan PPI, dapat membantu guru dalam menyusun PPI untuk tiap siswa berkebutuhan.

Berdasarkan hasil penelitian, SD N 1 Trirenggo sudah memiliki format PPI. Format PPI tersebut diberikan oleh PLB UNY, yang merupakan instansi yang telah bekerjasama dengan pihak sekolah. Akan tetapi, belum semua guru membuat PPI berdasarkan format yang ada.

2. Tingkat Kesiapan Aspek Tenaga Pendidik

a. Kompetensi Teknis

Lerner (dalam Mulyono (2003: 103) mengungkapkan bahwa salah satu kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh guru di sekolah inklusi adalah memahami berbagai teori tentang anak berkebutuhan khusus. Dengan seorang guru mengetahui kebutuhan khusus dari siswanya, maka guru tersebut dapat memberikan *treatment* yang sesuai dengan kebutuhan khusus siswa. Tenaga pendidik sudah mengetahui beberapa

teori terkait ABK, yaitu mengenai pendidikan inklusi serta faktor yang dapat menyebabkan seorang anak memiliki kebutuhan khusus.

Lerner juga mengungkapkan kompetensi teknis yang harus dimiliki guru adalah memahami berbagai tes berkaitan dengan ABK, dan juga kemampuan dalam melakukan asesmen dan evaluasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, belum semua guru terlibat dalam penjarangan, penyusunan program identifikasi, asesmen, dan pembelajaran ABK. Sebagian besar partisipasi guru yang ada adalah terkait pembelajaran ABK, sedangkan untuk asesmen ABK akan dilakukan oleh pihak PLB UNY.

Berdasarkan hasil penelitian, guru-guru di SD N 1 Trirenggo telah mengikuti beberapa kali pelatihan terkait ABK. pelatihan tersebut dilakukan oleh pihak sekolah maupun guru mengikuti di lingkungan kabupaten atau provinsi. Untuk pelatihan yang dilakukan oleh pihak sekolah, misal saja pelatihan dari PLB UNY dan karinakas.

Kompetensi teknis guru juga diamati selama proses belajar mengajar di kelas IV B. Kompetensi guru saat mengajar di kelas yang diamati ialah kemampuan guru dalam menggunakan berbagai metode pembelajaran yang inovatif; membantu ABK; memberikan motivasi pada ABK; dan juga penggunaan strategi khusus untuk siswa.

Kaitannya dalam kemampuan menjelaskan materi, siswa merasa guru di kelas IV B sudah mampu untuk menjelaskan materi dengan baik sehingga materi mudah dipahami.

b. Kompetensi Kolaboratif

Suyanto & Mujito (2014: 39) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan inklusi guru dituntut untuk melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya alam lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dengan adanya kolaborasi tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan pendidikan yang diberikan kepada anak reguler maupun ABK.

Kompetensi kolaboratif yang ada di SD N 1 Trirenggo Bantul adanya kerjasama antara guru kelas dan GPK dalam memberikan pelajaran, akan tetapi hal tersebut berlangsung sebelum GPK ditarik kembali oleh Dinas Provinsi. Saat ini, wujud kolaborasi yang nampak adalah dengan adanya keikutsertaan guru-guru dalam pertemuan rutin yang diadakan antara pihak sekolah dan juga pihak wali murid siswa ABK.

3. Tingkat Kesiapan Aspek Sarana-Prasarana

a. Pengadaan Sarana-Prasarana Khusus

Dalam Buku 7 Pedoman Penyelenggaraan inklusi (2007:4) dijelaskan bahwa pengadaan sarana dan prasarana yang diberikan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi adalah

hanya yang bersifat prioritas utama (sesuai dengan kebutuhan khusus, mudah dioperasikan/tidak memerlukan tenaga operasional khusus). Sehingga suatu sekolah penyelenggara inklusi tidak haruslah memiliki semua sarana-dan prasaran yang berkaitan dengan ABK untuk dapat melaksanakan sekolah inklusi, akan tetapi cukup dengan kebutuhan ABK yang ada di sekolah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, pengadaan sarana dan prasarana di SD N 1 Trirenggo Bantul belumlah lengkap sesuai dengan berbagai macam kebutuhan ABK. Namun dikarenakan tingkat kekompleksan jenis ABK yang ada di sekolah tersebut tidak terlalu tinggi, sekolah merasa sarana –pasarana yang ada sudah mencukupi kebutuhan ABK.. Sarana dan prasarana khusus yang ada untuk ABK di SD N 1 Trirenggo antara lain adalah toilet khusus untuk ABK, alat bantu jalan, alat terapi jalan, ruang sumber, media pembelajaran untuk melatih motorik halus ABK. Serta *setting* tangga yang merupakan lantai miring yang landai, untuk mempermudah aksesibilitas bagi pemakai kursi roda.

b. Pengelolaan Sarana-Prasarana

Dalam buku 7, Direktorat PLB (2007:32) dijelaskan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dilakukan oleh guru pendidikan khusus

(GPK), guru kelas dan tim dari berbagai profesi yang terkait (antara lain, dokter mata, psikolog, ahli pendidikan luar biasa, ahli olah raga anak luar biasa, *social worker*, konselor, dokter ahli THT, ahli terapi wicara, neurolog, dokter spesialis anak, dokter ortopedi, ortoris protetis, fisioterapis, okupasional terapis, ahli bahasa, dll sesuai jenis dan tingkat kemampuan anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan sarana dan prasarana di SD N 1 Tlirenggo dilakukan oleh kepala sekolah bersama dengan guru maupun GPK. Untuk sarana dan prasaran yang berada di ruang sumber inklusi akan menjadi tanggung jawab dari GPK (sewaktu posisi GPK masih diisi), sedangkan untuk saat ini ruang sumber menjadi tanggung jawab guru penjasorkes maupun guru kelas.

Wujud pengelolaan sarana dan prasaran yang dilakukan di SD N 1 Tlirenggo misal saja dalam pengarahannya penggunaan sarana dan prasarana yang ada. Saat *launching* kelas terapi/ ruang sumber, pihak sekolah mengundang bupati yang menjabat pada saat itu, beberapa instansi lain, dan juga masyarakat sekitar. Hal ini dimaksudkan untuk mengenalkan pada anak dan warga sekolah fungsi dan manfaat dari adanya ruang terapi tersebut. Wujud pengelolaan sarana dan prasarana yang lain adalah pengenalan sarana dan prasarana baru, yang baru saja ada di sekolah. Misal saja

sewaktu *hand dreel* ataupun toilet khusus ABK baru saja selesai pembuatan dan pemasangannya. Pengarahan tersebut dilakukan sewaktu upacara bendera, sehingga semua siswa dapat mengetahuinya.

4. Tingkat Kesiapan Aspek Lingkungan

a. Mengadakan Pertemuan

Lucy C. Martin (2009: 18) mengungkapkan sekolah (guru) sangat penting untuk menjadwalkan pertemuan dengan orang tua terkait kebutuhan ABK. Hal ini dirasa penting karena kedua belah pihak sama-sama perlu mengetahui kebutuhan dan perkembangan anak di sekolah maupun di rumah.

SD N 1 Tlirenggo sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi juga telah menjadwalkan pertemuan rutin antara pihak sekolah dengan pihak wali ABK. Pertemuan tersebut dijadwalkan satu bulan satu kali. Dalam pertemuan itu akan menghadirkan tim ahli terkait ABK, dan akan membahas kendala serta masalah yang ada pada siswa maupun dalam kaitannya penyelenggaraan pendidikan inklusi.

b. Mengirim Laporan Hasil Belajar

Cecil D. Mercer (1992: 121) menyatakan dengan dikirimnya hasil belajar anak, dapat membantu menjalin komunikasi antara guru dengan orang tua, dan dapat menyampaikan berbagai informasi seperti kinerja akademik, perilaku, hubungan dengan sesama, serta

tugas yang dimiliki anak. Selain itu, dengan dikirimnya hasil belajar pada orang tua, dapat memberikan kesempatan orang tua untuk mengetahui perkembangan anaknya. Terlebih dengan dikirimnya hasil belajar yang diperoleh anak setiap harinya, tidak hanya hasil belajar yang dikirim tiap semesternya.

Berdasarkan hasil penelitian, SD N 1 Trirenggo telah melakukan pertemuan rutin tiap bulan dengan wali murid siswa ABK. Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah juga akan mengkomunikasikan hasil belajar yang telah diperoleh oleh siswa ABK. Selain saat pertemuan rutin tiap bulannya, pengkomunikasian hasil belajar siswa juga dilakukan saat siswa mengikuti ulangan harian. Hasil ulangan harian tersebut akan dikirimkan pada orang tua. Untuk pengkomunikasian hasil nilai belajar secara keseluruhan, pihak sekolah akan mengkomunikasikannya sewaktu tengah semester ataupun akhir semester saat siswa menerima raport.

c. Melakukan Kunjungan Lapangan

Cook (2014: 104) menyatakan pentingnya seorang guru mendapatkan informasi dari keluarga ABK. Terlebih jika bisa melakukan observasi langsung terhadap apa yang dilakukan anak di lingkungan keluarganya. Dengan adanya observasi tersebut guru dapat mengetahui berbagai macam informasi tentang anak yang tidak bisa didapatkan di lingkungan sekolah.

SD N 1 Trirenggo telah melakukan kunjungan ke rumah siswa yang kurang memiliki motivasi untuk berangkat ke sekolah. Guru kemudian memberikan motivasi secara langsung pada anak dan orang tua siswa agar mau datang ke sekolah lagi.

d. Melibatkan Anggota Keluarga

Suyanto & Mudjito (2014:39) mengungkapkan bahwa dalam pendidikan inklusi penting untuk melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian, wujud keterlibatan anggota keluarga, terdapat wali murid yang menghadirkan pendamping untuk anaknya. Setiap hari (pendamping) mengantar-jemput ABK ke sekolah dan juga mendampingi selama proses belajar berlangsung. Terdapat juga keterlibatan dalam rapat rutin dengan pihak sekolah tiap bulannya, serta kehadiran seorang ibu setiap hari untuk menunggu anaknya di dalam kelas.

e. Mengundang Ahli.

Dedy Kustawan (2013: 154) mengemukakan bahwa sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dapat melibatkan instansi atau lembaga terkait yang memiliki program penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan keilmuan yang sama. Misalnya, dengan kelompok kerja pendidikan inklusif provinsi/ kabupaten/ kota, Sekolah Luar Biasa (SLB)/

Sekolah Khusus, perguruan tinggi, dll. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan pendidikan inklusi menjadi lebih optimal.

SD N 1 Trirenggo Bantul juga telah melakukan kerjasama dengan mengundang para ahli terkait pendidikan inklusi. Beberapa instansi/ lembaga terkait yang pernah diundang di SD N 1 Trirenggo misal saja dari PLB UNY, UGM, Karinakas, Dinamika Edukasi Dasar (DED), dan juga Puskesmas. Bentuk kerjasama dengan tim ahli tersebut ada yang berupa sebagai pembicara dalam pertemuan dengan wali murid, kerjasama dalam pengadaan sarana-prasaran ABK, maupun sebagai pelaksana asesmen untuk ABK

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV mengenai tingkat kesiapan sekolah dalam implementasi pendidikan anak berkebutuhan khusus di kelas IV B SD Negeri 1 Trirenggo Bantul, maka dapat disimpulkan:

1. Pada aspek kurikulum, belum semua proses pengembangan PPI diikuti; tim pengembang PPI dan pengembangan PPI juga belum dapat dilakukan, untuk modifikasi kurikulum dan inti materi, pengaturan pemberian layanan, perencanaan waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi sudah dilakukan meskipun belum sempurna. Sedangkan untuk format PPI, sekolah telah memiliki format tersebut.
2. Pada aspek tenaga pendidik, untuk kompetensi teknis tenaga pendidik yang ada

telah mengetahui tentang teori ABK, mengikuti pelatihan terkait ABK, serta memiliki kemampuan dalam mengajar diantaranya penggunaan metode mengajar yang inovatif, memberikan bantuan khusus pada ABK, memberikan motivasi pada ABK, dan adanya intervensi strategi khusus yang digunakan, namun belum semua guru terlibat dalam penjaringan, penyusunan program identifikasi, asesmen, dan pembelajaran ABK. Pada kompetensi kolaboratif, tenaga pendidik telah mengikuti pertemuan dengan wali murid, namun untuk berkolaborasi dengan GPK tidak dapat dilakukan karena selama penelitian berlangsung posisi GPK tengah kosong.

3. Pada aspek sarana-prasarana, meskipun sarana prasaran yang ada belum bisa sesuai dengan standar yang seharusnya ada, namun dikarenakan kekhususan siswa tidak begitu kompleks, sarana dan prasarana yang ada sudah dapat menunjang kebutuhan siswa. Selain itu, sekolah juga sudah melakukan pengelolaan sarana dan prasarana khusus, yaitu dengan melaksanakan pengarahan penggunaan sarana prasarana pada siswa dan mampu mengatasi keterbatasan sarana prasaran yang ada.
4. Pada aspek lingkungan masyarakat, terdapat lima indikator kesiapan yang sudah terpenuhi. Indikator tersebut adalah: mengadakan pertemuan, mengirim hasil laporan belajar, melakukan kunjungan lapangan, melibatkan anggota keluarga, dan mengundang ahli. Akan tetapi, pengiriman

hasil belajar akan lebih maksimal bila tidak hanya dilakukan satu bulan satu kali saja.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran kesiapan sekolah harus lebih ditingkatkan lagi agar pelaksanaan pendidikan inklusi menjadi lebih maksimal. Kesiapan tersebut meliputi kurikulum, tenaga pendidik, sarana-prasarana, dan lingkungan. Kesiapan kurikulum dapat ditingkatkan dengan dibuatnya tim pengembang PPI, serta adanya pengembangan PPI untuk tiap ABK. Guru harus lebih kreatif dalam penggunaan metode dan media pelajaran, serta lebih bervariasi dalam memberikan materi pada peserta didik. Sekolah sebaiknya memiliki GPK sekolah, tidak hanya GPK yang diperbantukan dari dinas provinsi. Sarana-prasaran sebaiknya lebih dilengkapi terutama untuk anak berkebutuhan khusus, agar dapat menunjang proses pembelajaran menjadi lebih baik. Misal saja media pembelajaran edukatif untuk ABK.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Junianto. (2015). *Duh, Bantul tak Punya Guru Inklusi*. Diakses dari <http://m.harianjogja.com/baca/2015/04/10/duh-bantul-tak-punya-guru-inklusi-593417>. Pada tanggal 21/10/15. Pukul 20.10 WIB.
- Chen, Cook Klein. (2014). *Adapting Early Childhood Curricula for Children with Special Needs*. United States of America: Pearson Education Limited.
- Dedy Kustawan. (2013). *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta : Lumixa Metro Media.
- Direktorat PLB. (2007). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*.

Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.

- _____. (2007). *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Buku 2: Pengembangan Kurikulum..* Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- _____. (2007). *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Buku 3: Kegiatan Pembelajaran..* Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- _____. (2007). *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Buku 7: Pedoman Khusus Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Pendidikan..* Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.

Ina Rosilawati. (2013). *Trik Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan Inklusif*. Yogyakarta: Familia.

Martin, Lucy C. (2009). *Strategies for Teaching Students with Learning Disabilities*. California: Corwin Press.

Mercer, Cecil D. (1992). *Students with Learning Disabilities*. United States: Macmillan Publishing.

Misbach. D. (2012). *Seluk-Beluk Tuna Daksa & Strategi Pembelajarannya*. Yogyakarta: Javalitera.

Mulyono Abrurrahman. (2003). *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Pendidikan Khusus Layanan Khusus. (2013). *Jambore ABK Dikdas Tingkat Nasional Thn 2013 ke-3*. Diakses dari www.pk-plk.com. Pada tanggal 21/10/15. Pukul 20.00 WIB.

Suyanto & Mujito. (2014). *Masa Depan Pendidikan Inklusif*. Jakarta : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar